

## **Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Kantor BPPKAD Kabupaten Bima)**

**Arman<sup>1</sup>, Mukhlis Ishaka<sup>2</sup>, Haeril<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bima sudah berjalan dengan baik. Dengan aplikasi ini, Pemerintah lebih mudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA jauh lebih baik dari sistem manual, yang dapat dilihat dari karakteristik pengukuran kualitas laporan keuangan. Namun demikian juga masih terdapat kendala-kendala seperti belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Juga belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan aset akibat lemahnya *Data Management Systems*. Serta masih adanya beberapa operator input data (user) ataupun pengguna SIMDA yang belum memahami siklus laporan keuangan pada software SIMDA sehingga mengakibatkan adanya kesalahan output laporan keuangan. Akibat kurangnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan komputer operator (pengguna) operasional.

**Kata Kunci:** *Impelementasi, Sistem, informasi, manajemen, SIMDA.*

### **Abstract**

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) in the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency (BPPKAD) of Bima Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of SIMDA in the Financial Management Board and Regional Assets of Bima Regency has been going well. With this application, it will be easier for the Government to implement financial management so that local governments can manage their regional finances in an integrated manner, starting from budgeting, administration, to accounting and reporting. The quality of the financial reports resulting from the application of SIMDA is much better than the manual system, which can be seen from the characteristics of measuring the quality of financial reports. However, there are still obstacles such as the absence of documentation regarding a summary flow chart that displays the flow

of data cash from the raw data to the printed information. There is also no overall data integration between the SIMDA Finance and SIMDA BMD applications between financial reporting and asset reporting due to weak Data Management Systems. As well as there are still several user operators or SIMDA users who do not understand the financial report cycle in the SIMDA software, resulting in errors in the output of financial statements. As a result of the lack of training related to the ability of operational operator computer skills.

**Keywords:** Implementation, System, information, management, SIMDA.

Copyright (c) 2022, Arman

✉ Corresponding author :

Email Address : [Arman.umar@gmail.com](mailto:Arman.umar@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional (Leiwakabessy, 2016).

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah sehingga terjadi perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau asset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan asset daerah yang professional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan asset daerah (Azzindani & Irwan, 2020).

Namun permasalahan dalam pengelolaan asset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, juga dipengaruhi karena banyaknya asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut seperti yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal penatausahaan asset daerah, masih banyak asset atau barang milik daerah yang belum masuk dalam data inventarisasi barang milik daerah. Permasalahan tersebut muncul akibat sistem pengelolaan asset yang masih bersifat manual (Fitrahady., *et.al* 2020).

Sehingga dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi, Asset, dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melakukan penataan Administrasi, asset, dan Keuangan Daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Hartoyo, 2020). Sebab penggunaan teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang tangguh dan mampu

melahirkan keunggulan kompetitif dalam membuat pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik informasi, yaitu tepat waktu (Jumawal, *et.al*, 2020).

Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basis pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan (Lestari & Abidin, 2022).

Berdasarkan data resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2021 bahwa Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemerintah Daerah dari 542 pemerintah daerah yang ada. Dimana terdiri dari SIMDA Keuangan terimplementasi pada 304 Pemda, SIMDA BMD terimplementasi pada 403 Pemda, SIMDA Gaji terimplementasi pada 51 Pemda, SIMDA Pendapatan terimplementasi 169 Pemda, dan SIMDA Integrated terimplementasi 196 Pemda (BPKP.go.id).

Penerapan SIMDA Kabupaten Bima dilakukan sejak tahun 2017 guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung peningkatan opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap realisasi anggaran pada semua jajaran SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima. Untuk itu dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam rangka untuk memahami permasalahan terkait dengan Manajemen Sistem informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, penulis melakukan penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Kantor BPPKAD Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan secara deskriptif tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan, Keuangan, dan aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Adapun sumber data yaitu Data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dimana penulis mengadakan pengumpulan data. Ada juga data sekunder (*secondary data*) ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literature yang berhubungan dengan penelitian yang bersifat melengkapi atau mendukung data primer. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, dimana menurut Miles dan Huberman

*dalam* (Muhammad, 2009) ialah teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi SIMDA di Kabupaten Bima

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebenarnya telah mulai melaksanakan SIMDA pada tahun 2014 lewat asistensi dari BPKP. Idealnya, SIMDA dijalankan mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga laporan keuangan. Namun baru terimplementasikan dengan baik dan efektif pada tahun 2017 pada level penganggaran. Level penganggaran memerlukan masukan berupa pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Satu tahun kemudian, selain penganggaran, penatausahaan juga telah menerapkan SIMDA. Penatausahaan memerlukan masukan yang lebih banyak yaitu SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Kemudian tahun 2018, semua SKPD di Kabupaten Bima telah melaksanakan SIMDA secara efektif hingga pada level laporan keuangan.

Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA pada dasarnya tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA diinstalasikan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah instalasi, komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di kantor BPPKAD. BPPKAD menjadi lokasi server karena dinas ini yang langsung menangani sistem informasi keuangan daerah tersebut. SKPD kemudian datang ke dinas BPPKAD untuk mendapatkan nama pengguna dan kata kunci untuk masuk ke dalam server. Karena sarana yang diperlukan tergolong sederhana, maka sarana-sarana ini sepenuhnya tersedia pada SKPD lainnya.

Kemudian semua proses yang terjadi di dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan lewat SIMDA merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Proses Penyusunan RKA, b. Proses Penyusunan DPA, c. Proses Pembuatan Anggaran Kas, d. Proses Pergeseran Anggaran, e. Proses Perubahan Anggaran.

Secara umum pengaplikasian SIMDA pada kantor BPPKAD telah mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual. Selain itu juga membantu Pimpinan (Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran) dalam mengambil keputusan sesuai data dan informasi yang ada. Dengan sistem Pengendalian Intern yang berjalan dengan cukup baik dimulai dari Penganggaran, Penatausahaan sampai pada pelaporan.

### Kemampuan Kerja SDM SIMDA

Pengguna SIMDA terdiri dari beberapa level mulai dari operator berupa PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), bendahara pengeluaran, dan bendahara pendapatan, serta pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan satu Auditor dari Inspektorat, supervisor dari seorang pejabat pengelola keuangan daerah, administrator dari dua orang pejabat pengelola keuangan daerah. Total SDM yang terlibat sebagai pengguna SIMDA adalah sebanyak 120 pengguna. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pendidikan pegawai adalah S1 dengan mayoritas merupakan sarjana di bidang manajemen. Dengan profil SDM seperti ini, peneliti berargumen bahwa SIMDA dirancang dengan interface yang baik, asalkan individu

mau belajar maka ia dapat memahami dan menggunakan SIMDA. Hal ini terlebih lagi adanya dilema antara dasar pendidikan TI dengan dasar pendidikan akuntansi. Seorang pengguna dengan latar TI mungkin dapat sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara itu, seorang pengguna dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan TI. Karenanya, latar pendidikan tidak terlalu diutamakan tetapi aspek yang lebih diutamakan adalah aspek diklat, sehingga perlunya upaya pelatihan secara berkala dalam meningkatkan SDM pengelolaan SIMDA.

Kompetensi dari SDM SIMDA harus bertopang pada kinerja diklat. Hal pertama yang diajarkan adalah bagaimana menggunakan SIMDA. Pelatihan dasar ini mencakup cara menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis. Pelatihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan BPKP sebagai pemegang hak cipta dari SIMDA. Pelatihan dilakukan pada seluruh pengguna SIMDA, termasuk PPK. PPK dilibatkan karena ia diperlukan untuk melakukan pengesahan mengenai kesesuaian data yang dimasukkan bendahara dalam SIMDA.

### **Kendala-Kendala dalam Implementasi SIMDA di BPPKAD Kabupaten Bima**

Adapun kendala-kendala dalam penerapan SIMDA di BPPKAD Kabupaten Bima yaitu, belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Persoalan ini kelihatannya sederhana, tetapi terkadang bias menyulitkan Pimpinan dalam mengawasi arus informasi di BPPKAD. Sehingga Pihak BPPKAD Kabupaten Kabupaten Bima perlu untuk membuat bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak.

Kemudian Belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan asset akibat lemahnya *Data Management Systems* ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku, munculnya eksekusi *overflow reporting, redundancy* yang tidak efisien dan sebagainya. Sehingga pihak BPPKAD Kabupaten Kabupaten Bima harus melakukan mekanisme *export impor* data, yaitu dengan cara mengekspor data pelaporan keuangan dari aplikasi SIMDA Keuangan yang kemudian bisa diimpor ke aplikasi SIMDA BMD Begitu pun sebaliknya, mengekspor data pelaporan asset dari aplikasi SIMDA BMD yang bisa diimpor ke aplikasi SIMDA Keuangan.

Masih adanya beberapa operator input data (*user*) ataupun pengguna SIMDA yang belum memahami siklus laporan keuangan pada software SIMDA sehingga mengakibatkan adanya kesalahan output laporan keuangan akibat adanya kesalahan input data yang mengakibatkan perbaikan input ulang (*edit & update*) data kembali. Kurangnya pemahaman terhadap siklus laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengguna SIMDA yang mempunyai latar belakang pendidikan, dan juga disertai kurangnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan komputer operator (*pengguna*) operasional Aplikasi SIMDA sehingga Pihak BPPKAD Kabupaten Bima harus mengirimkan para operator (*user*) input data SIMDA untuk mengikuti kegiatan pelatihan secara rutin yang diselenggarakan oleh tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penyedia jasa Aplikasi SIMDA maupun kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Bima dalam

rangka meningkatkan kemampuan pemahaman akuntansi pemerintah daerah dan keterampilan proses input yang benar.

Namun secara keseluruhan, penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Kantor BPPKAD Kabupaten Bima dapat dimengerti, relevan, andal, dapat diperbandingkan dan meningkatkan ketepatan waktu dalam informasi yang dihasilkan. Dengan adanya aplikasi SIMDA, Dinas BPPKAD Kabupaten Bima tidak perlu melakukan pengelolaan laporan secara manual seperti sebelum adanya aplikasi SIMDA.

## SIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kabupaten Bima sudah berjalan dengan baik. Dengan aplikasi ini, pemerintah lebih mudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelola keuangan daerahnya secara terintegrasi, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) jauh lebih baik dari sistem manual, yang dapat dilihat dari karakteristik pengukuran kualitas laporan keuangan. Namun demikian juga masih terdapat kendala-kendala seperti belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Juga belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan asset akibat lemahnya *Data Management Systems*. Serta masih adanya beberapa operator input data (user) ataupun pengguna SIMDA yang belum memahami siklus laporan keuangan pada software SIMDA sehingga mengakibatkan adanya kesalahan output laporan keuangan. Akibat kurangnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan komputer operator (pengguna) operasional.

## Referensi :

- Azzindani, R., & Irwan, M. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 31-54.
- Fitrahady, K. F., Zuhairi, A., & Riadhussyah, M. (2020). Recovery Aset Daerah Yang Dijadikan Agunan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Bumd. *Arena Hukum*, 13(3), 550-567.
- Hartoyo, H. (2020). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).
- Jumawal, J., Hafied, I., & Maedina, R. (2020). Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. *Accounting Journal*, 1(3), 132-137.
- Leiwakabessy, A. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Maneksi*, 5(2), 30-36.
- Lestari, I. D., & Abidin, M. Z. (2022). Analisis Kendala Dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dinas Prkpp Kabupaten Barito Utara Kalteng. *Administraus*, 6(1), 95-117.
- Muhammad, I. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. *Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga.